

PERKEBUNAN TEBU DI MADIUN MASA BELANDA TAHUN 1900-1930

Dyah Retno Wulan

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail : dyahw5290@gmail.com

Drs. Agus Trilaksana, M.Hum.

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Keberadaan perkebunan tebu yang ada di Madiun pada tahun 1900-1930 memang menarik untuk diteliti dan dipelajari secara mendalam. Pada awal abad ke-20, Madiun berperan dalam menjadikan Hindia Belanda sebagai penghasil gula terbaik dan terbesar di dunia mengalahkan Kuba, Suriname, dan Filiphina. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sekarang yang harus mengimpor gula dari luar negeri. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor gula karena pabrik gula dalam negeri belum mampu memenuhi suplai kebutuhan gula dalam negeri karena banyak pabrik gula yang tua dan tidak mampu memproduksi secara efisien.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana kondisi perkebunan tebu di Madiun pada tahun 1900-1930?, 2) Bagaimana dampak adanya perkebunan tebu terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Madiun pada tahun 1900-1930?, dan 3) Bagaimana dampak krisis ekonomi tahun 1930 terhadap perkebunan tebu dan industri gula di Madiun? Dengan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan perkembangan perkebunan tebu di Madiun dari tahun 1900 sampai 1930 dan dampak yang diakibatkan dari adanya perkebunan tebu di Madiun dari segi ekonomi, serta dampak adanya depresi ekonomi dunia yang melanda tahun 1930 terhadap produksi dan harga gula di Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi 4 tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik adalah tahap dalam pencarian sumber fokus penelitian yang diperoleh dari koleksi arsip untuk sumber utama, buku-buku yang relevan untuk sumber sekunder, serta skripsi, jurnal, dan internet untuk sumber tersier yang dapat dijadikan data pendukung pada fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkebunan tebu di Madiun pada tahun 1900-1930 dapat berkembang pesat di daerah Madiun karena memiliki kondisi geografi yang mendukung untuk tumbuh kembang tanaman tebu. Jenis tanah yang mendominasi daerah Madiun adalah tanah alluvial dan lathosol yang cocok untuk tanaman tebu. Selain itu, daerah Madiun termasuk dalam daerah iklim sedang yang memiliki curah hujan yang merata dan memiliki sumber air yang melimpah karena diapit oleh pegunungan serta dilewati oleh aliran Bengawan Madiun yang bermuara ke Bengawan Solo. Perkebunan tebu di Madiun mengalami perkembangan pesat, mulai dari pembangunan irigasi sampai modernisasi sarana prasarana. Perkebunan tebu di Madiun juga berdampak pada kondisi sosial yaitu dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap hingga dikenalnya uang sebagai alat pembayaran, serta dampak depresi ekonomi 1930 yang mengakibatkan harga gula menjadi turun dan menimbulkan konflik sosial, seperti pembakaran lahan, pemogokan kerja buruh, dan munculnya perbanditan. Bagi masyarakat yang

menyewakan lahannya untuk perkebunan tebu (petani *sikep*), mereka mendapatkan uang sewa dan prioritas menjadi pekerja perkebunan, namun uang sewa yang diterima kerap kali tidak cukup untuk membayar pajak ataupun memenuhi kebutuhan hidup.

Kata Kunci : Perkebunan Tebu, Madiun, tahun 1900-1930

SUGAR CANE PLANTATIONS ON DUTCH COLONIAL PERIOD AT MADIUN 1900-1930

Abstract

The existence of sugar cane plantations at Madiun during 1900-1930 is interesting to studied. On 20th century, Madiun was be part to making the Dutch East Indies as the largest sugar producers in the world defeating Cuba, Suriname, and Philippines. This is inversely proportional to the current conditions to import the sugar from another country. The government explain that the domestic sugar factories have not to able the supply of sugar needs because many sugar factories are old and unable to produce efficiently.

The problems for discuss to this article is 1) How was the condition of sugar cane at Madiun in 1900-1930?, 2) How the impact of sugar cane plantations for the social and economic of Madiun's citizens in 1900-1930?, and 3) How the impact of 1930's economic crisis for the sugar cane plantations and sugar industry at Madiun? The purpose of this scientific article is to describe the development of Madiun sugar cane plantations from 1900 to 1930 and economic impact of the Madiun sugar cane plantations existence, and impact of 1930 world economic depression for production and sugar price in Madiun. This is a history research, so the method who used is historical research method who divided into fours step, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The heuristic is one of step who was search the research source who got from archive collection for primary, relevant books for secondary, and essay, jurnal, and internet links fot tertiary who can be supporting sources on this research.

*The results showed that sugar cane plantations at Madiun in 1900-1930 can develop rapidly in Madiun area because has a great geographical to support sugar cane growth. Alluvial and lathosol is dominate soil in Madiun who suitable for sugar cane. And then Madiun has a temperate climate which has a solid rainfall and has a abundant water sources because flanked by mountains and passed by Bengawan Madiun into Bengawan Solo. Madiun sugar cane plantations can rapid development, start from irrigation development to modernization of infrastructure. Madiun's sugar cane plantations also impact to social conditions, like many workers absorbed until money recognition as a payment, and the effects of the 1930's economic depression causes social conflicts, such a labor strikes burning, work strike, and appeared the bandits. For the people who rents their land to sugar cane plantation (*sikep*), they got money reny and priority became a plantations workers, however the money rent who they got is not enough for pay the tax or the social life.*

Keywords : Sugarcane Plantations, Madiun, 1900-1930

PENDAHULUAN

Keberadaan perkebunan tebu yang ada di Madiun pada tahun 1900-1930 memang menarik untuk diteliti dan dipelajari secara mendalam. Hal ini

berkaitan dengan pemilihan tahun pada penelitian ini sebab pada rentan tahun tersebut terjadi kenaikan produksi pada awal abad ke-20 yang menjadikan Hindia Belanda sebagai produsen gula terbaik dan terbesar di dunia dengan produksi 15 ton/hektar

mengalahkan Kuba, Suriname, dan Filipina.¹ Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia yang kini lebih menjadi negara importir gula daripada eksportir gula. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor gula pada September 2018 berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendagri) No.117/M-DAG/PER/12/2015 yang menyatakan bahwa Indonesia diperbolehkan untuk mengimpor gula berupa gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih.² Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor gula bukan tanpa alasan. Pemerintah berpendapat bahwa pabrik gula dalam negeri belum mampu memenuhi suplai kebutuhan gula dalam negeri karena banyak pabrik gula yang tua dan tidak mampu memproduksi secara efisien.³

Kebijakan impor gula yang tengah dilakukan oleh Indonesia kini tentu bertolak belakang dengan pencapaiannya di industri gula pada awal abad ke-20 yang Hindia Belanda sebagai negara penghasil gula terbesar di dunia. Pencapaian ini tidak terlepas dari dihapuskannya sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula (*Suiker Wet*) yang menandakan bahwa telah terjadi proses pelaksanaan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda. Melalui Undang-Undang Gula inilah para pengusaha swasta asing mulai menanamkan investasi dalam industri perkebunan di Hindia Belanda, termasuk industri perkebunan tebu. Undang-Undang Agraria dianggap sejalan dengan Undang-Undang Gula karena melalui Undang-Undang Agraria inilah para pengusaha swasta asing mendapatkan modal utama untuk industri perkebunan, yaitu tanah, karena dalam undang-undang ini mengatur mengenai sistem penyewaan

lahan perkebunan milik pribumi. Mayoritas tanaman yang mereka tanam adalah tanaman kopi, nila, teh, tembakau, tebu, ketela, dan sebagainya yang memiliki nilai jual tinggi di pasar dunia.⁴

Tebu merupakan salah satu tanaman ekspor yang banyak dibudidaya di Hindia Belanda, khususnya daerah Jawa. Tidak seperti sekarang yang hampir di setiap wilayah Pulau Jawa memiliki areal perkebunan tebu, pada masa kedatangannya ke Hindia Belanda tebu tidak terlalu diminati untuk dibudidayakan. Hal ini disebabkan karena tebu banyak memakan lahan, masa tanam yang relatif lama, serta perawatan tanaman yang membutuhkan biaya yang tak sedikit. Baru setelah Perang Jawa (1825-1830) selesai, Belanda mendapatkan sejumlah lahan baru, seperti di Banyumas, Kedu, Kediri, dan Madiun. Wilayah-wilayah tersebut menjadi lahan percobaan untuk ditanami tebu oleh Belanda.⁵ Peran Madiun dalam perindustrian gula juga didukung oleh sarana prasarana yang digunakan untuk keperluan perkebunan tebu, seperti pembangunan saluran irigasi yang merupakan implementasi substansi dari Politik Etis 1901 yang berguna untuk mengairi perkebunan milik negara maupun swasta, pembangunan pabrik gula dan modernisasi peralatan produksi, dan penyerapan tenaga kerja yang mayoritas diambil oleh penduduk sekitar perkebunan maupun dari daerah luar.

Industri gula mulai yang tidak stabil tidak hanya terjadi pada saat ini, namun juga pada tahun-tahun sekitar 1930-an. Tahun 1929 yang merupakan awal dari terjadi depresi perekonomian dunia yang juga berdampak pada pasang surut perdagangan gula. Meskipun pada tahun 1920 nilai ekspor gula mencapai puncaknya, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi kemerosotan karena turunnya harga

¹ Knight, G.R., *Colonial Production in Provincial Java the Sugar Industry Pekalongan-Tegal 1800-1942*, (Amsterdam: VU Universty Press, 1993), hlm. 8-9.

² Aulia Adhiem, Masyithah, Aeptember 2018, "Kebijakan Impor Gula : Potensi Dampak dan Upaya Pengamanan Stok Nasional", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X No. 17, diakses dari

<http://berkas.dpr.go.id/puslit/> pada 7 Mei 2020 pukul 11.17, hlm. 19.

³ *Ibid*, hlm. 21.

⁴ Van Zanden, Jan Luiten, dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010*, (New York : Routledge, 2012), hlm. 147-148.

⁵ Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Djilid Pertama*, (Jakarta: Negara Pradnjaparamitha, 1962), hlm. 93

gula walau jumlah produksi meningkat. Depresi ekonomi dunia yang terjadi sekitar tahun 1930-an juga berdampak pada perekonomian Hindia Belanda, termasuk perdagangan gula. Harga ekspor gula mulai menurun karena produksi gula bit meluas. Akibat depresi ini pula para pekerja diberhentikan dan gaji yang dibayarkan berkurang sampai 90%. Depresi ekonomi ini mengakibatkan produk ekspor dari Hindia Belanda tak lagi didominasi oleh gula dan kopi.⁶

Berbagai aspek kehidupan mulai berubah sejak penerapan ekonomi liberal di Hindia Belanda, terutama aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial yang dilandasi oleh teori sosial Karl Marx. Marx dalam teori sosialnya berpendapat bahwa kondisi ekonomi akan merubah mekanisme perubahan sosial dari feodalisme ke kapitalisme dan masyarakat akan mulai bergantung pada sistem ekonomi yang berkembang yang di dalamnya juga mengandung konflik-konflik sosial yang dapat menimbulkan krisis maupun masalah.⁷ Dalam aspek ekonomi, Awalnya, masyarakat menganut sistem ekonomi tradisional atau subsisten. Baru setelah terjadi perubahan, masyarakat mulai menganut sistem ekonomi kolonial. Kedua sistem ekonomi ini berjalan berdampingan dalam masyarakat. Hal ini disebut dualisme ekonomi oleh J.H. Boeke, ekonom asal Belanda. Boeke menjelaskan bahwa konsep dualisme ekonomi yang berkembang dalam masyarakat kolonial sekitar perkebunan dapat terlihat dari struktur dasar ekonomi masyarakat (*plural economic theory*), yang dapat dinyatakan suatu sistem ekonomi dikuasai oleh individu (swasta).⁸ Dalam pandangannya, Boeke menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara sistem ekonomi tradisional atau subsisten dengan sistem ekonomi kolonial atau kapitalis meski keduanya berkembang beriringan dan sangat kuat dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tentang “Perkebunan Tebu di Madiun Masa Belanda Tahun 1900-1930” dengan rumusan masalah 1) Bagaimana kondisi perkebunan tebu di Madiun pada tahun 1900-1930?, 2) Bagaimana dampak adanya perkebunan tersebut terhadap ekonomi masyarakat Karesidenan Madiun pada tahun 1900-1930?, dan 3) Bagaimana dampak krisis ekonomi tahun 1930 terhadap perkebunan tebu dan industri gula di Madiun?

METODE

1. Heuristik

Heuristik merupakan proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. Pencarian pertama sumber utama dilakukan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur dan ditemukan sumber berupa peta rel pabrik gula dan trem Jawa, 1 laporan (*Verslag*) terbitan tahun 1916, 1 bendel laporan tahunan (*jaarverslag*) Madiun terbitan tahun 1928, dan 1 buku ikhtisar statistik Hindia Belanda tahun 1930 dalam koleksi arsip *Verslag I*. Pencarian sumber gambar dilakukan di KITLV media dan ditemukan beberapa foto yang relevan, diantaranya 7 foto jembatan kereta (1916-1919), 7 foto kali Madiun, 6 foto irigasi perkebunan tebu di Madiun, 6 foto transportasi pengangkut hasil panen tebu dari perkebunan (1916-1930), 2 foto lahan perkebunan tebu di Madiun, 2 foto mesin pabrik tebu PG. Pagottan (1917), 1 foto bangunan Pabrik Gula Redjo Agung (1930), 1 foto peta jalur kereta tebu di Madiun (1928), dan 1 foto pemotongan dan penyortiran bibit tebu di Madiun pada tahun 1910.

Pencarian sumber pendukung dilakukan di Perpustakaan Daerah Surabaya dan menemukan buku Ong Hok Ham yang berjudul *Madiun*

⁶ Furnivall, J.S., *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Intitute, 2009), hlm. 400.

⁷ Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Yayasan Obor, 1992), hlm. 212.

⁸ Boeke, J.H., *Indonesian Economics : The Concepts of Dualism in Theory and Policy*, dalam Breman, Jan, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Koloial*, (Jakarta: LP3S, 1986), hkm. 184-185.

dalam Kemelut Sejarah : Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX.

2. Kritik

Kritik merupakan proses uji kelayakan serta kredibilitas dari sumber sejarah yang digunakan. Pada tahap ini kritik yang digunakan adalah kritik intern. Kritik intern menurut Kuntowidjoyo (1995) adalah menguji kredibilitas dan kevalidan isi sumber yang didapat. Pada kritik sumber, penulis melakukan uji kebenaran dan relevansi antara sumber dengan tema penelitian agar didapatkan fakta sejarah yang benar dan tepat. Pada kritik sumber, penulis melakukan verifikasi sumber untuk menguji validitas sumber yang diperoleh dalam upaya penulisan sejarah. Sumber-sumber yang telah ditemukan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

3. Interpretasi

Setelah melalui tahapan heuristik dan kritik sumber, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi merupakan proses mencari hubungan antara fakta atau sumber yang ditemukan. Interpretasi merupakan tahap yang paling esensi dalam metode penelitian sejarah. Interpretasi terletak diantara batas analisis sumber dan penyajian sejarah sebagai cerita. Hubungan antar fakta-fakta yang terdapat dalam sumber tersier seperti buku, skripsi, dan jurnal yang relevan telah ditemukan. Kemudian, hubungan tersebut disusun menjadi sebuah tulisan sejarah.

4. Historiografi

Historiografi merupakan proses penulisan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Setelah melalui proses heuristik, kritik secara intern, dan interpretasi mengenai sumber-sumber yang terkait dengan perkebunan tebu di Madiun pada tahun 1900-1930, kemudian disusun berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang ada menjadi sebuah penelitian dengan judul “Perkebunan

Tebu di Madiun pada Masa Kolonial Tahun 1900-1930”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Madiun Abad ke-20

1) Topografi Madiun

Dilihat dari letak garis lintangnya, Madiun berada di 7°12”-7°48” Lintang Selatan sampai 111°25”-111°51” Bujur Timur,⁹ dan memiliki luas sekitar 1.147 km² pada tahun 1930.¹⁰ Sedangkan dilihat dari aspek topografi, daerah Madiun merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 100-500 Mdpl,¹¹ yang membujur dari arah Utara ke Selatan berbatasan dengan Bojonegoro di utara, Ngawi dan Magetan di Barat, Ponorogo di selatan, dan Nganjuk dan Kediri di timur.

Wilayah Madiun memiliki kondisi tanah yang subur serta memiliki sumber mata air yang melimpah karena diapit oleh 2 gunung dan 1 pegunungan, yaitu Gunung Lawu di barat, Gunung Wilis di selatan, dan Pegunungan Kendeng di utara.¹² Secara geologis, tanah di daerah Madiun memiliki struktur yang terdiri dari jenis tanah alluvial, mediteran, latosol, litosol, dan grumusol. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Madiun, tanah yang mendominasi di seluruh wilayah Madiun adalah tanah alluvial dengan prosentase sebesar 36%. Tanah alluvial merupakan tanah endapan yang terbentuk dari endapan lumpur sungai di wilayah dataran rendah dan memiliki sifat tanah yang subur.

Secara klimatologis, iklim Madiun dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur kira-kira 20-35°C.¹³ Madiun memiliki curah hujan

⁹ Letak geografis Madiun, diakses dari <https://madunkab.bps.go.id/staticable/> pada 21 Februari 2020 pukul 20.44.

¹⁰ *Ikhtisar Statistik Hindia Belanda 1930* dalam Koleksi Arsip *Verslag I*, hlm. 1.

¹¹ Pemerintah Kabupaten Madiun, *Pokja Sanitasi Madiun : Buku Putih Kabupaten Madiun*, (Madiun, 2012), hlm. I-1.

¹² *Ibid, loc.cit.*

¹³ *Ibid, op.cit.*, hlm. I-14.

rata-rata mencapai 179,28 mm/tahun dengan rata-rata 110 hari hujan/tahun dan Di Madiun sendiri, intensitas hujannya sekitar 18,50-19,48 mm/bulan yang menandakan bahwa intensitas hujan di Madiun termasuk dalam golongan rendah.¹⁴

2) Kondisi Demografis

Madiun abad ke-20 penduduknya bukan hanya berasal dari pribumi saja, namun juga penduduk-penduduk asing yang mulai bermukim, seperti orang Eropa, orang Arab, dan orang China yang melakukan perdagangan maupun bekerja untuk perusahaan-perusahaan swasta yang tengah berkembang saat itu. Bertambahnya ragam penduduk di Jawa juga berdampak pada kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat Jawa (pribumi) saja, namun juga masyarakat Eropa, Tionghoa, dan Arab. Kenaikan jumlah penduduk berdasarkan pada jumlah imigrasi, jumlah kelahiran, dan kematian.

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Karesidenan Madiun Tahun 1880-1900

Kabupaten	Tahun				
	1880	1885	1890	1895	1900
Madiun	217.329	187.115	206.928	210.400	227.771
Ngawi	133.019	160.006	176.408	186.362	211.846
Magetan	159.394	227.789	251.731	254.376	264.991
Ponorogo	304.139	276.069	247.243	292.613	328.282
Pacitan	178.303	143.434	150.885	172.485	194.871

Sumber : Ong Hok Ham, "Madiun dalam Kemelut Sejarah", hlm. 202.

Berdasarkan tabel 1, jumlah penduduk di Madiun mengalami peningkatan sejak akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, meskipun mengalami penurunan pada sekitar tahun 1885-an. Jumlah penduduk yang banyak, khususnya penduduk pribumi, sangat dibutuhkan sebagai pekerja dalam perkebunan tebu, apalagi akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 industri perkebunan tebu di Madiun

mengalami peningkatan dengan ditandai bertambahnya jumlah pabrik gula di daerah Madiun menjadi 3 pabrik, yaitu Pabrik Gula Kanigoro, Pagottan, dan Redjo Agung. Bertambahnya jumlah pabrik gula juga berdampak pada meningkatnya jumlah lahan yang dibutuhkan untuk penanaman tebu, dan secara otomatis permintaan atas tenaga kerja juga semakin meningkat.

Wilayah yang digunakan untuk perkebunan atau pabrik gula sebagian besar merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk sekitar 300-400 jiwa, seperti distrik Ponorogo (477.943 jiwa) dan Madiun sendiri sekitar 397.435 jiwa.¹⁵ Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja di sekitar perkebunan maupun pabrik gula.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Penduduk di Madiun

Penduduk	Tahun					
	1926		1927		1928	
	L	P	L	P	L	P
Eropa	726	793	728	770	745	791
Pribumi	13.801	14.432	13.756	14.627	13.662	14.821
Tionghoa	1.989	1.400	1.512	1.261	1.640	1.275

Sumber : Schotman, *Gemeente Madioen: Jaarverslag over 1928*, dalam koleksi arsip *Verslag I 1930*, hlm. 3.

Dari tabel diatas, jumlah penduduk pribumi lebih mendominasi daripada penduduk asing. Namun, dapat terlihat bahwa jumlah penduduk Tionghoa lebih banyak daripada jumlah penduduk Eropa, bahkan jumlahnya lebih dari dua kali lipat penduduk Eropa yang ada di Madiun. Para penduduk Tionghoa kebanyakan adalah berjenis kelamin laki-laki, sebab mereka banyak dibutuhkan untuk tenaga pekerja di perkebunan maupun pabrik disamping tenaga kerja dari pribumi.

3) Mata Pencaharian Penduduk

Madiun sebagai wilayah yang mayoritas berada di dataran rendah dan memiliki lahan pertanian maupun perkebunan yang luas, maka tidak mengherankan apabila mata pencaharian

¹⁴ Klimatologi Madiun, diakses dari <https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/> pada 25 Februari 2020 pukul 09.05, Surabaya.

¹⁵ *Staat. Jaaroverzicht 1930* dalam *Ikhtisar Statistik Hindia Belanda 1930*, hlm. 12.

masyarakatnya mayoritas adalah sebagai petani atau buruh perkebunan tanaman ekspor, maupun buruh pabrik. Pada awal abad ke-20, perkembangan perkebunan tanaman ekspor mengalami peningkatan, sehingga perusahaan-perusahaan swasta banyak memerlukan tenaga kerja yang ditempatkan sebagai buruh pabrik maupun perkebunan. Selain sebagai petani maupun buruh, masyarakat Madiun juga banyak menjabat sebagai staf pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh Residen yang memimpin pada masa itu. Bagian pemerintahan yang dipekerjakan berupa staf karesidenan maupun kepala desa beserta bawahannya. Selain itu juga masyarakat Madiun bekerja sebagai peternak, pengurus makam, dan sebagai penyedia layanan jasa peminjaman uang.¹⁶

4) Pemerintahan

Pada masa kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, seluruh karesidenan dipimpin oleh seorang residen yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda. Seorang residen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan asisten residen maupun bupati, dan memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi pemerintahan di setiap kabupaten, sedangkan tugas pokoknya adalah sebagai pejabat pamong praja, mewakili berbagai tugas dari Gubernur yang berkaitan dengan Karesidenan dan berpengaruh terhadap kelancaran sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah karesidenan, Madiun memiliki tata pemerintahan yang terdiri dari seorang residen yang berkedudukan di Madiun Kota, seorang pembantu residen yang berkedudukan di Madiun Kota, tiga orang asisten residen yang berada di Madiun, Ngawi, dan Ponorogo, dan seorang sekretaris yang membawahi kantor karesidenan dan bupati-bupati tiap daerah.¹⁷

Berdasarkan laporan tahun 1928 daerah Madiun oleh Schotman,¹⁸ tata pemerintahan Madiun adalah sebagai berikut :

- Ketua dewan kota : R.A. Schotman, selaku walikota Madiun.

- Anggota dewan kota :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. W. Ch. L. Brocx | 7. F.K.O. de Korte |
| 2. W. L. Buurman van Vreeden | 8. Njoo Hong See |
| 3. M. F. J. Gritters Doublet | 9. M. Oeripan |
| 4. C. A. d'Hanens | 10. J. A. Platte |
| 5. R. S. Honggowinoto | 11. R. Soejadi |
| 6. R.M. Irawan | 12. A.H. Stikker |

B. Perkebunan Tebu di Madiun Tahun 1900-1930

A. Awal Mula Perkebunan Tebu di Madiun

Tebu mulai masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar abad ke-17 pada masa VOC yang sedang menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang dilaksanakan untuk mendatangkan keuntungan untuk pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Awal abad ke-20 menjadi titik awal perkembangan perkebunan tebu di Hindia Belanda. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal menuntut adanya gagasan baru untuk merubah politik kolonial di Hindia Belanda. Tebu tidak lagi menjadi tanaman yang hanya sebagai pelengkap komoditas ekspor bagi Hindia Belanda, namun telah menjadi komoditas utama di Negara ini. Gula kristal produk Hindia Belanda dianggap memiliki kualitas yang baik dan merupakan negara penghasil gula terbesar dengan produksi 15 ton/hektar mengalahkan Kuba, Suriname, dan Filipina. Jantung perkebunan tebu di Jawa Timur tumbuh di sekitar daerah Pasuruan, Besuki, dan Surabaya. Salah satu jantung daerah perkebunan tebu di Jawa Timur adalah Madiun.

Madiun merupakan daerah yang termasuk dalam daerah perluasan areal tanam perkebunan tebu di Jawa Timur. Madiun bagian daerah dataran rendah sangat cocok untuk ditanami tebu karena struktur tanahnya yang subur serta

¹⁶ Schotman, *Gementee Madioen : Jaarverslag over 1928*, dalam Koleksi Arsip *Verslag I 1930*, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, hlm. 6.

¹⁷ Pemerintah Kabupaten Madiun Tingkat II, *Sejarah Kabupaten Madiun*, (Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun, 1980), hlm. 182.

¹⁸ Schotman, *op.cit.*, hlm. 2.

banyaknya saluran irigasi yang mendukung penanaman tebu. Melihat kondisi geografi yang cocok, banyak pengusaha asing yang mulai tertarik untuk memulai industri perkebunan tebu di wilayah Madiun. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pabrik tebu yang berdiri di Madiun, seperti PG. Kanigoro, PG. Pagottan, dan PG. Redjo Agung. Pabrik-pabrik gula ini mulai mempopulerkan tebu sebagai industri yang berharga di wilayah Madiun. Bahkan PG. Pagottan sampai memperluas areal tanamnya hingga ke wilayah Distrik Ponorogo.

B. Perkembangan Perkebunan Tebu di Madiun Tahun 1900-1930

a) Lahan Tebu dan Sistem Sewa Lahan

Sistem penyewaan tanah sebenarnya dimulai diberlakukan sejak masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda yang dikenal dengan *landelijk stelsel*. Dalam kepemimpinannya, Raffles menghendaki bahwa sistem pengganti dari sistem VOC adalah sistem pertanian yang memberikan kebebasan pada petani untuk menanam tanaman dagangan (*cash crops*) yang dapat diekspor keluar Hindia Belanda, dan pemerintah kolonial hanya memiliki kewajiban untuk menciptakan peluang pasar yang dapat merangsang petani untuk menanam tanaman ekspor.¹⁹ Kebijakan ini kemudian diulang kembali pada awal abad ke-20 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bentuk realisasi dari Undang-Undang Agraria.

Tahun 1918 pemerintah kolonial mengeluarkan ordonansi sewa tanah (*Groundhuur Ordonnantie*) yang berlaku untuk tanah Jawa dan Madura, kecuali daerah Yogyakarta dan Surakarta.²⁰ Menurut ordonansi sewa tanah, pengusaha tebu swasta dapat menyewa tanah melalui sistem kontrak dengan jangka waktu 21,5 tahun. Selama masa sewa, 2

tahun sekali lahan pertanian akan dikembalikan ke pemilik tanah untuk digarap sendiri selama 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun hanya terdapat 1/3 lahan yang digarap oleh petani sendiri.²¹

Tabel 3. Luas Areal Tanam Perkebunan Tebu di Madiun (dalam *bau*)

Tahun	Luas	Harga Sewa (dalam <i>gulden</i>)
1925	-	-
1927	-	-
1928	609	53
1929	91	61
1930	112	56

Sumber : *Stat. Jaaroverzicht 1930* dalam Ikhtisar Statistik Hindia Belanda Tahun 1930, hlm. 247.

Berdasarkan tabel di atas, harga sewa tanah untuk areal perkebunan mengalami perbedaan harga setiap tahunnya. Dapat diamati bahwa tahun 1928 sewa lahan untuk lahan seluas 609 *bau* bernilai 53 *gulden*, yang menunjukkan bahwa harga sewa lahan pertanian untuk perkebunan tebu sampai pada tahun 1928 masih murah. Sedangkan pada tahun-tahun sesudahnya mulai mengalami kenaikan sewa untuk tanah dengan luas sekitar 100 *bau*. Untuk mempermudah masalah penyewaan tanah, pihak perkebunan, kepala daerah, penguasa desa (kepala desa), dan pegawai pemerintahan melakukan kerjasama.²² Aparatur desa ikut serta dalam masalah penyewaan lahan milik penduduk pribumi agar mempermudah pemilik perkebunan swasta untuk menyewa lahan pertanian yang ada di desa. Aparatur desa ini dikepalai oleh kepala desa yang oleh pemerintah kolonial dijadikan sebagai *political broker* guna melayani pengusaha swasta maupun pemerintah kolonial.²³

Di Madiun, perkebunan tebu akan menyewa lahan yang luas dan berdekatan setiap tahunnya. Pergiliran tanaman yang terjadi antara

¹⁹ Marwati Djoened, Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 90.

²⁰ Rusdi, Evizal, *Pengelolaan Perkebunan Tebu*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 3.

²¹ *Ibid*, hlm. 4.

²² Breman, Jan, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta: LP3S, 1986), hlm. 44.

²³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Indonesia dalam Arus Sejarah*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 113.

tanaman tebu dan tanaman pangan milik pemilik tanah dijalankan dengan cara setiap tahun sepertiga luas lahan harus diserahkan kepada perkebunan tebu. Sistem yang disebut dengan sistem *glebagan* ini lebih cenderung menguntungkan pihak penyewa daripada pemilik lahan, karena pertama adalah untuk membongkar lahan kebun tebu memakan waktu yang lama dan membutuhkan banyak biaya dan tenaga yang dibebankan pada pemilik lahan, kedua adalah pengusaha swasta berhak atas *plant cane* diatas lahan sewaan, dan ketiga adalah masa tanam sampai panen tebu membutuhkan waktu sekitar 14 bulan, sehingga membatasi petani untuk menanam tanaman pangan di lahannya sendiri.²⁴ Dengan rentan waktu tanam yang minim, petani tidak memiliki waktu lebih untuk menghasilkan tanaman pangan untuk diri mereka sendiri.

b) Pembangunan Irigasi

Awal abad ke-20 merupakan masa dimana industri gula mengalami perkembangan dan peningkatan, sehingga untuk mengimbangi peningkatan tersebut, pemerintah kolonial membangun sarana prasarana yang mendukung perkebunan tebu di wilayah Madiun, salah satunya adalah pembangunan irigasi. Pembangunan irigasi yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial diadakan secara besar-besaran agar produksi tebu semakin meningkat, meskipun masih ada petani-petani pribumi yang menggunakan saluran irigasi sederhana untuk mengairi lahan pertaniannya.²⁵

Tahun 1909 sampai 1917 terus terjadi pembangunan di kali-kali wilayah Madiun. Dengan meningkatnya kualitas pengairan, maka hasil yang akan diperoleh akan menjadi semakin baik bagi perkebunan tebu. Untuk pengerjaan irigasi, pemerintah tidak memungut biaya air untuk pertanian petani kecil, kecuali kepada pabrik untuk pengairan perkebunan sebesar f. 5 per *bau*.²⁶ Irigasi di wilayah Madiun mengandalkan sungai atau

Bengawan Madiun yang bermuara ke Bengawan Solo sebagai pemasok air untuk kebutuhan perkebunan tebu maupun lahan pertanian tradisional pada musim kemarau dan musim hujan.

Tabel 4. Luas Areal Pembangunan Saluran Irigasi di Madiun (dalam *bau*)

Tahun	Luas
1925	10.298
1927	11.210
1928	8.110
1929	8.032
1930	7.676

Sumber : *Staat. Jaaroverzicht* 1930 dalam Ikhtisar Statistik Hindia Belanda Tahun 1930, hlm. 244.

Dari tabel di atas, Madiun terus melakukan pembangunan dan perbaikan irigasi, baik untuk keperluan perkebunan maupun pertanian pangan biasa. Tahun 1927 membangun dengan luas sekitar 11.210 *bau*, sedangkan untuk tahun-tahun setelahnya mulai mempersempit ruang pembangunan irigasi, hingga pada tahun 1930 hanya membangun seluas 7.676 *bau*. Berkurangnya pembangunan irigasi dapat disebabkan tidak adanya aliran yang stabil untuk daerah perkebunan yang dituju, hingga ketidakcocokkan lahan yang ditanami dengan pertumbuhan tebu.

c) Pembangunan Sarana Prasarana Perkebunan a. Transportasi Tebu

Dalam dunia perkebunan tebu, tujuan dari modernisasi alat transportasi adalah untuk memperlancar distribusi tebu dari perkebunan ke pabrik gula dan efisiensi waktu pengiriman. Sebelum dilakukan modernisasi alat transportasi perkebunan masih menggunakan perahu untuk jalur air dan gerobak dengan tenaga hewan untuk jalur darat. Perahu digunakan untuk mengangkut hasil panen tebu dari lahan perkebunan yang terletak di pedalaman dan jauh dari pabrik gula. Di Madiun sendiri, jalur transportasi air berada di kali-kali sekitar perkebunan yang mengalir ke daerah Bengawan Madiun dan Bengawan Solo sebagai

²⁴ Rusdi, Evizal, *op.cit.*, hlm. 4.

²⁵ Effendi, Pasandaran, *Reformasi Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air dalam Analisis Kebijakan Pertanian (Vol. 3, No. 3, 2005)*, diakses

dari <https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/> pada 2 Maret 2020 pukul 10.34, Surabaya, hlm. 222.

²⁶ Furnivall, J.S., *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 334.

pusat dari transportasi air. Sedangkan untuk transportasi di darat sendiri lebih banyak didominasi oleh gerobak yang ditarik oleh tenaga hewan, seperti sapi, kerbau, dan sapi. Namun transportasi gerobak yang ditarik oleh hewan ini memakan waktu berhari-hari yang dalam perjalanannya terdapat tempat berhenti, sehingga dalam aspek waktu merugikan pihak perkebunan dan pabrik karena efisiensi waktu serta produksi yang lama akibat kedatangan bahan baku yang lambat.

Akibat beberapa faktor yang mempengaruhi kelangsungan produksi, pihak pemerintah kolonial dan perkebunan swasta mulai membangun jembatan kereta *lori* sebagai cikal bakal kereta api yang lebih modern. Pembangunan serta pelebaran jembatan untuk kereta tebu di Madiun pernah tertunda pada tahun 1922 yang akhirnya terlaksana pada tahun 1928 yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sipil dengan pelebaran sekitar 6 meter dan menghabiskan biaya 5.830 *gulden*.²⁷

b. Mesin Pabrik Gula

Untuk mengolah tebu-tebu yang telah dipanen tentunya membutuhkan fasilitas mesin pabrik yang modern. Oleh karena itu, pabrik-pabrik gula di Madiun yang mendapatkan perhatian dari POJ (*Proefstation Oost Java*), Pusat Penelitian Pabrik Gula pada masa itu yang berpusat di Pasuruan, dengan mulai memberikan konsultasi mesin-mesin modern yang harus digunakan oleh pabrik gula agar produksi gula berkualitas baik. Proses modernisasi dalam bidang perkebunan sejatinya telah terjadi sejak awal tahun 1880-an, namun mengalami puncaknya pada awal abad ke-20 dan perkembangannya telah menuju korporatisasi. Dengan adanya modernisasi serta kepopuleran gula, perusahaan-perusahaan swasta yang menaungi pabrik-pabrik gula di Madiun berubah menjadi perusahaan besar yang tidak hanya bergerak di

bidang perkebunan, namun juga pertambangan, perbankan dan lain-lain.

d) Pabrik Gula di Madiun

Luas lahan untuk perkebunan tebu mengalami kenaikan mulai 800 *bau* pada 1860 dan 6.400 *bau* pada sekitar tahun 1910.²⁸ Dengan bertambahnya luas perkebunan tebu, jumlah pabrik gula juga mengalami peningkatan, yaitu menjadi 3 pabrik gula, diantaranya Pabrik Gula Kanigoro, Pagottan, dan Redjo Agung. Pabrik gula pertama adalah PG. Kanigoro yang merupakan pabrik gula besutan perusahaan *Cultuur Handel & Industry Bank NV* pada tahun 1894 di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu. PG. Kanigoro telah mengalami nasionalisasi pada tahun 1950 sampai 1966 dan telah menjadi bagian dari PT. Perkebunan Nasional XI (PTPN XI). Pabrik gula kedua adalah PG. Pagottan yang merupakan pabrik gula tertua di Madiun karena dibangun sejak tahun 1884 di wilayah Oeteran, dekat Kecamatan Geger, Madiun, yang didirikan oleh perusahaan swasta *NV Coody Costern van Voorvout*.²⁹ PG. Pagottan juga mengalami nasionalisasi dan menjadi bagian dari PT. Perkebunan Nasional XI (PTPN XI).

Selain kedua pabrik gula swasta Eropa di atas, Madiun juga memiliki pabrik gula yang didirikan oleh orang Tionghoa. Adalah pabrik gula Redjo Agung yang merupakan pabrik gula milik swasta pertama di Madiun yang didirikan oleh perusahaan gula Tionghoa terbesar di Jawa saat itu, *Oei Tiong Ham Concern* yang berpusat di Semarang. Pabrik Gula Redjo Agung menjadi pabrik gula pertama yang menggunakan tenaga listrik dalam operasinya, serta menjadi pabrik gula karbonasi terbesar di dunia pada tahun 1930. PG. Redjo Agung bergabung (*merger*) dengan PG. Krebet Baru yang kemudian menjadi PT. Pabrik Gula Rajawali I, anak perusahaan PT. PPEN (Persero) yang bergerak di bidang agroindustri berbasis tebu.³⁰

²⁷ Schotman, *op.cit.*, hlm. 9.

²⁸ Burger, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia Jilid I*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1962), hlm. 209.

²⁹ Pabrik Gula Pagottan, diakses dari <https://ptpn11.co.id> pada 31 Desember 2019 pukul 09.33, Madiun.

³⁰ Pabrik Gula Pagottan, diakses dari <https://ptpn11.co.id> pada 31 Desember 2019 pukul 09.33, Madiun.

e) Perkebunan Tebu Madiun dan Depresi Ekonomi 1930

Tahun 1930 menjadi awal petaka bagi perindustrian di Hindia Belanda. Industri gula yang digandrungi oleh pasar dunia karena memiliki kualitas baik mulai memudar pada awal tahun 1929. Apalagi di tahun 1928-1929 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan harga gula sebelum terjadi insiden *Black Tuesday* atau turunnya bursa saham di Wall Street, New York, dan dimulainya krisis ekonomi pada awal abad ke-20. Sebab lain adalah harga gula yang lebih mahal dibandingkan dengan gula bit yang lebih murah daripada gula kristal putih produksi Hindia Belanda, apalagi sasaran konsumen dari gula bit hampir sama dengan konsumen gula kristal. Akibat hal tersebut, pengusaha gula mulai kesulitan mencari pangsa pasar untuk memasarkan gula produksinya.³¹ Bahkan, seluas 1.349 Ha perkebunan tebu di Madiun telah memproduksi 576.484 kg gula di tahun 1930.³² Namun produksi ini sia-sia karena harga gula pada tahun ini 1 pikulnya (setara dengan 60 kg) hanya dihargai 90 sen (5 sen setara dengan 0,5 *gulden* pada masa itu), yang artinya 1 pikul gula hanya dihargai 9 *gulden*.³³

Keadaan perkebunan tebu pada tahun ini juga diperparah dengan adanya wabah melasse atau penyakit sereh yang menyerang pertumbuhan tebu sehingga tumbuh dengan tubuh pendek seperti tanaman sereh. Hal ini semakin membuat pihak perkebunan merugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan penyakit sereh, sedangkan pemasukan dari menjual gula hampir tidak ada. Dampak lain dari depresi dunia ini tak hanya menerpa pihak perkebunan tebu, tetapi juga menimpa pekerja perkebunan tebu maupun pabrik, yaitu diberhentikan dan gaji yang diterima berkurang 90%.³⁴

C. Dampak Sosial-Ekonomi Terhadap Masyarakat Sekitar Perkebunan Tebu di Madiun Tahun 1900-1930

1) Dampak Sosial

Dinamika industri perkebunan tebu yang menunjukkan eksistensinya dalam menopang ekonomi Hindia Belanda pada awal abad ke-20 sudah tentu melibatkan seluruh aspek tempat yang bersangkutan, termasuk penduduknya. Para pekerja dalam industri perkebunan tebu mayoritas diambil dari penduduk sekitar perkebunan dan tidak jarang pihak perkebunan mendatangkan pekerja dari luar daerah. Selain itu juga terdapat pekerja yang berasal dari pemerintahan kolonial, seperti *administrateur*, sebagai kepala perkebunan yang dibantu oleh kontrolir, kemudian kepala bagian yang membawahi asisten, mandor, dan para buruh pekerja. Sistem *glebagan* yang diterapkan dalam penyewaan lahan oleh pemerintah kolonial memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yaitu dengan mengutamakan pemilik lahan atau petani *sikep* sebagai pekerja perkebunan tebu, baru merekrut penduduk lain untuk bekerja di perkebunan. Di perkebunan tebu, pihak perkebunan tidak hanya mempekerjakan laki-laki saja, namun juga wanita bahkan anak-anak bekerja saat pemilihan bibit, panen, sampai mengolah tebu menjadi gula.³⁵

Layaknya industri yang memerlukan jumlah orang yang banyak tentu tak dapat dihindarkan dari masalah dan berdampak pada sosial di wilayah perkebunan tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi perkebunan tebu yang ada di Madiun. Puncaknya adalah terjadi pembakaran kebun tebu oleh para pekerja kebun maupun petani yang berakibat pada kerusuhan sosial pada tahun 1930-an. Laporan menunjukkan peningkatan statistik pembakaran lahan yang dilakukan oleh pekerja maupun petani sekitar 3,5% sampai 8% lahan setiap tahun. Hal ini dikaitkan dengan anggapan bahwa upah dan sewa tanah yang rendah yang diberikan

³¹ Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 332.

³² *Staat. Jaaroverzicht 1930* dalam Ikhtisar Statistik Hindia Belanda Tahun 1930, hlm. 263.

³³ Koleksi Arsip *Binnenlandsch Bestuur 1931*, hlm. 19.

³⁴ Furnivall, J.S., *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Intitute, 2009), hlm. 400.

³⁵ Padmo, Soegijanto, *Bahan Seminar : Ekonomi Perkebunan dan Keresahan di Pedesaan Sebuah Survei Awal*, (Yogyakarta: Bahan Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1994), hlm. 11.

oleh pihak perkebunan tebu.³⁶ Residen Boissevain melaporkan bahwa konflik antara petani dan pekerja dengan pihak perkebunan memburuk sejak tahun 1907 dan semakin memuncak mendekati tahun 1930-an.³⁷ Selain terjadi kerusuhan dalam perkebunan yang diwujudkan dengan membakar lahan tebu, keadaan ekonomi masyarakat yang kian terjepit dengan berbagai pajak yang harus dibayar serta kebutuhan ekonomi yang semakin naik, juga terjadi peristiwa-peristiwa kecil yang berujung pada kerusuhan kecil di lingkup masyarakat, seperti pencurian hewan ternak, pencurian air di irigasi milik perkebunan, dan juga telah marak terjadi perbandingan.

Kerusuhan lain yang merupakan akibat perkebunan tebu di wilayah Madiun adalah adanya gerakan buruh pabrik gula yang diorganisir oleh Sarekat Islam cabang Karesidenan Madiun. Hal ini dipicu oleh pemberhentian beberapa buruh pabrik gula yang ikut dalam jaringan Sarekat Islam oleh PG. Redjo Agung pada Februari 1920.³⁸ Buruh yang terjaring dalam Sarekat Islam kemudian melaporkan kejadian ini ke pengurus pusat Persatuan Fraksi Buruh (PFB) di Yogyakarta, kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman delegasi PFB untuk rapat bersama dengan pihak PG. Redjo Agung pada 1 Maret 1920 dan kesepakatan yang diperoleh adalah kemenangan dari pihak buruh. Mendengar kabar kemenangan dari pihak buruh di PG. Redjo Agung, segera para buruh perkebunan PG. Kangoro melakukan aksi menuntut perbaikan nasib hidup mereka. Buruh perkebunan melakukan aksi pemogokan untuk menebang tebu, bahkan para tukang *cikar* juga mogok untuk tidak mengirimkan bahan baku tebu ke pabrik. Buruh yang terjaring dalam Sarekat Islam kemudian melaporkan kejadian ini ke pengurus pusat Persatuan Fraksi Buruh (PFB) di Yogyakarta, kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman delegasi PFB untuk rapat bersama dengan pihak PG. Redjo Agung pada 1 Maret 1920

dan kesepakatan yang diperoleh adalah kemenangan dari pihak buruh. Mendengar kabar kemenangan dari pihak buruh di PG. Redjo Agung, segera para buruh perkebunan PG. Kangoro melakukan aksi menuntut perbaikan nasib hidup mereka. Buruh perkebunan melakukan aksi pemogokan untuk menebang tebu, bahkan para tukang *cikar* juga mogok untuk tidak mengirimkan bahan baku tebu ke pabrik.³⁹

Selain menempuh jalan damai untuk meminimalisir kerusuhan sosial yang diakibatkan buruh perkebunan tebu, untuk menghindari kejahatan sosial yang semakin merebak di wilayah pedesaan, V. J. Hofland selaku Residen Madiun memerintahkan untuk mulai memperketat keamanan dengan menugaskan petugas keamanan untuk berjaga dan berpatroli untuk mencegah adanya kerusuhan di perkebunan tebu, sehingga pihak perkebunan setuju membayar polisi khusus yang diorganisir oleh para priyayi setempat di bawah perintah bupati atau wedana.⁴⁰ Polisi khusus perkebunan ini akan bertanggung jawab kepada kontrolir perkebunan. Setelah adanya pembentukan polisi khusus perkebunan ini, angka pembakaran lahan perkebunan dan masalah sosial mulai menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2) Dampak Ekonomi

a) Harga Gula

Keberhasilan Hindia Belanda sebagai produsen pertanian "*par excellent*" yang mampu memproduksi komoditas-komoditas yang laku di pasaran dunia, seperti gula, kopi, tembakau, kina, teh, dan sebagainya, berdampak pada peningkatan ekspor pada awal abad ke-20.

Tabel 5. Harga Gula di Madiun (dalam *gulden*)

Tahun	Jenis Gula		
	Muscovado	Gula Utama	Gula Unggulan
1915	9	9,4 - 11,4	10,4 - 13
1916	9 ¾ - 12,5	10 - 14	11 - 15

³⁶ Hok Ham, Ong, *Madiun dalam Kemelut Sejarah : Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm.205.

³⁷ *Ibid*, hlm. 207-208.

³⁸ *Ibid, loc.cit.*

³⁹ *Loc.cit.*

⁴⁰ *Loc.cit.*

1917	11 - 13	10,5 - 13,5	12 - 15,4
------	---------	----------------	-----------

Sumber : *Suikerprijsen* dalam Koleksi Arsip *Verslag I 1916*, hlm. 55.

Dari tabel 5 di atas, harga gula di Madiun dalam rentang tahun 1915-1917 mengalami naik turun. Untuk jenis gula muscovado pada tahun 1916, dalam rentang bulan April sampai Mei harga gula mengalami kenaikan sekitar 3 *gulden*. Jenis gula utama pada Mei 1915 harga gula berkisar 9,4 – 11 *gulden*, namun mengalami penurunan harga pada bulan Oktober yaitu 9,5 *gulden*, dan mengalami kenaikan pada bulan Desember, yaitu harga gula mencapai 11,4 *gulden*. Harga tersebut kemudian turun kembali pada Januari 1916, yaitu hanya 10 *gulden*, dan pada bulan-bulan selanjutnya harga mulai merangkak naik dan pada bulan November harga gula utama menembus angka 14 *gulden*. Jenis gula unggulan pada tahun 1915 harga gula dapat mencapai 13 *gulden*. Namun pada Maret 1916 harga gula unggulan jatuh ke harga 11 *gulden* dan mengalami kenaikan kembali pada bulan Oktober yang menembus harga 15 *gulden*.⁴¹

b) Upah Pekerja

Perubahan sistem ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda kemudian berdampak pada daerah-daerah yang ada, termasuk di Madiun. Sebelumnya, sistem ekonomi untuk membayar tenaga kerja adalah menggunakan sistem gotong royong. Namun seiring berkembangnya ekonomi liberal di Hindia Belanda, sistem gotong royong mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem uang. Pembayaran tenaga kerja mulai dibayarkan dengan uang sebagai ganti tenaga yang telah dikeluarkan. Adanya perkebunan tebu yang mulai meluas di daerah Madiun, membuat pihak perkebunan mencari tenaga kerja untuk memaksimalkan proses produksi tebu di wilayah perkebunan maupun pabrik. Menurut W.T.L. Boissevain, residen Madiun (1902-1907), dalam *Memorie van Overgave* (Laporan Serah Terima Jabatan) melaporkan bahwa terjadi perbedaan upah dan uang sewa yang diberikan pihak perkebunan

antara akhir akhir abad ke-19 dengan awal abad ke-20.

Tabel 6. Perbedaan Upah dan Uang Sewa yang Diterima dari Perkebunan Tebu di Madiun/bau (dalam sen)

Tahun	Upah Pekerja	Uang Sewa Lahan	Upah Pekerja Pabrik Gula
1890	25 - 30	13,50 - 27,50	30 – 50
1906	25 – 40	25 - 40	25 – 35

Sumber : Ong Hok Ham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah*, hlm. 206.

Dalam tabel diatas, Bossevain melaporkan bahwa pada akhir abad ke-19 terjadi penurunan yang konstan dalam pemberian upah pekerja dan uang sewa lahan yang diberikan untuk petani. Bossevain juga menyebutkan bahwa pada tahun 1900 meski sudah diberikan uang sewa lahan, para petani masih diwajibkan untuk membayar pajak tanah. Hal ini tentu sangat memberatkan kaum petani. Namun, pada tahun 1906 uang sewa lahan naik karena mendapatkan tekanan dari pemerintah. Hal itu tidak sejalan dengan upah yang diterima oleh pekerja di kebun maupun pabrik. Korupsi yang dilakukan oleh pihak mandor seringkali membuat para pekerja, terutama pekerja wanita, hanya menerima upah tidak lebih dari 8-9 sen.⁴²

PENUTUP

Ekonomi liberal yang berlaku di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 menandakan bebas masuknya investasi asing dan mendorong industri perkebunan ekspor berkembang pesat, termasuk industri gula. Berdasarkan data statistik Hindia Belanda pada tahun 1930, luas lahan yang dibutuhkan untuk areal perkebunan tebu mencapai 112 *bau*. Kondisi ini diikuti dengan perbaikan saluran irigasi yang membutuhkan tanah seluas hampir 11 ribuan *bau* yang dibangun diberbagai perkebunan di daerah Madiun, serta peralihan transportasi yang awalnya menggunakan gerobak atau pedati kemudian berubah menggunakan *lori*

⁴¹ *Suikerprijsen* dalam Koleksi Arsip *Verslag I 1916*, hlm. 55.

⁴² Hok Ham, Ong, *op.cit.*, hlm. 206.

sebagai pengangkut hasil panen agar kualitas gula yang dihasilkan tidak turun kualitasnya.

Di Madiun sendiri, adanya perkebunan tebu di wilayah ini berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Di sektor ekonomi, masyarakat yang bekerja di perkebunan mulai mengenal uang sebagai upah bagi para pekerja. Upah di perkebunan tebu di Madiun sendiri berbeda antara lelaki dan wanita. Berdasarkan buku karya Ong Hok Ham, pada tahun 1906 upah yang diterima pekerja laki-laki sebesar 40 sen, sedangkan untuk wanita sebesar 25 sen. Upah pekerja tersebut tidak merujuk pada hukum ekonomi permintaan dan penawaran, namun merujuk pada harga gula yang ada di pasaran, yaitu bila harga gula sedang turun, maka upah para pekerja juga mengalami penurunan, namun bila harga gula naik, upah pekerja belum tentu mengalami kenaikan.

Di sektor sosial, adanya sistem *glebagan* yang mengharuskan lahan pertanian sebagai lahan menanam bahan pangan harus bergantian dengan lahan perkebunan tebu. Hal ini menyebabkan petani pemilik lahan tidak dapat menanam padi untuk simpanan pangan selanjutnya karena selalu terdesak oleh waktu penanaman tebu yang membutuhkan waktu hampir 2 tahun sampai masa panen tebu tiba. Hal ini tentu menyebabkan krisis pangan bagi penduduk sekitar perkebunan, yang akhirnya menyulut aksi pembakaran lahan, serta aksi pemogokan kerja oleh buruh perkebunan tebu (yang diorganisir oleh Sarekat Islam) akibat upahnya tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Krisis pangan yang terjadi juga menyebabkan munculnya bandit-bandit yang mulai menjamur di wilayah pedesaan. Untuk menurunkan angka kejahatan sosial, V.J. Hofland, selaku Residen Madiun, mulai membentuk polisi khusus perkebunan tebu yang berguna untuk memantau keadaan perkebunan tebu agar terhindar dari kebakaran dan juga membereskan masalah-masalah sosial yang ada.

Industri gula yang mencapai kejayaan pada awal abad ke-20, terutama pada tahun 1920 yang menunjukkan nilai ekspor yang tinggi, yaitu bernilai sekitar 694 *guilder*/ton, mulai menunjukkan

penurunan pada tahun berikut-berikutnya. Lesunya permintaan gula ini didasari oleh depresi ekonomi yang terjadi awal tahun 1929 dan berdampak pada produksi dan harga gula. Berdasarkan arsip *suikerprijzen* dalam koleksi arsip *Verslag I*, seluas 1.349 Ha perkebunan tebu di Madiun telah memproduksi 576.484 kg gula di tahun 1930, dengan harga gula pada tahun ini 1 pikulnya (setara dengan 60 kg) hanya dihargai 90 sen (5 sen setara dengan 0,5 *gulden* pada masa itu), yang artinya 1 pikul gula hanya dihargai 9 *gulden*. Keadaan perkebunan tebu pada tahun ini juga diperparah dengan adanya wabah melasse atau penyakit sereh yang menyerang pertumbuhan tebu sehingga tumbuh dengan tubuh pendek seperti tanaman sereh. Keadaan dunia yang carut marut akibat depresi ekonomi membuat pihak perusahaan maupun pemerintah kolonial tidak mampu memasarkan gula yang telah diproduksi. Akibatnya gula banyak ditimbun, upah pekerja banyak yang tidak dibayarkan, dan terjadi kerusuhan sosial baik di luar maupun di dalam perkebunan, seperti pembakaran lahan tebu yang terjadi pada tahun 1930-an dan mulai banyak bermunculan bandit-bandit desa serta kejahatan kriminal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Kaart Der Suikerfabrieken Spoor-En Tramwegen Van Java en Madoera, Koleksi Arsip Statis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur

Gementee Madioen : Jaarverslag over 1928

Verslag I : Verslag van het Departement Soerabaja 1916

Staat Jaaroverzicht Over Hindia Belanda 1930

B. Buku

Breman, Jan. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES

Burger, D.H. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Djilid Pertama*. Jakarta: Negara Pradnjaparamitha

- Burke, Peter. 1922. *Sejarah dan Teori Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Obor <https://ptpn11.co.id>
sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/
- Evizal, Rusdi. 2018. *Pengelolaan Perkebunan Tebu*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Intitute
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Knight, G.R. 1993. *Colonial Production in Provincial Java the Sugar Industry in Pekalongan-Tegal 1800-1942*. Amsterdam: VU University Press
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang
- Ong, Hok Ham. 2018. *Madiun dalam Kemelut Sejarah : Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Pemerintah Kabupaten Madiun. 2012. *Pokja Sanitasi Madiun : Buku Putih Kabupaten Madiun*. Madiun
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Soegijanto, Padmo. 1994. *Bahan Seminar : Ekonomi Perkebunan dan Keresahan di Pedesaan Sebuah Survai Awal*. Yogyakarta: Bahan Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
- Van Zanden, Jan Luiten, dan Daan Marks. 2012. *An Economic History of Indonesia 1800-2010*. New York : Routledge

C. Internet

- <https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/>
- <http://berkas.dpr.go.id/puslit/>
- <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/>
- <https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/>
- <https://madiunkab.bps.go.id/staticable/>